

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Menggerakkan roda perekonomian nagari merupakan upaya pemerintah nagari dalam merealisasikan pembangunan nagari, salah satu contoh usaha yang digiatkan adalah pembentukan Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari yang disingkat BUMNag diartikan sebagai lembaga usaha nagari yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah nagari yang berorientasi untuk memperkuat perekonomian nagari yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi sumber daya. BUMNag sebagai lembaga ekonomi yang dikelola pemerintah dan masyarakat merupakan bentuk pengelolaan ekonomi yang dilakukan atas dasar kerjasama, partisipatif, transparansi, dan akuntabel. Pengelolaan BUMNag dijalankan dibawah kontrol pemerintah nagari, namun tetap melibatkan masyarakat, sebagai partisipan dalam menjalankan program yang dibuat.

Adapun tujuan didirikannya BUMNag (dalam Halim 2019:3) adalah meningkatkan perekonomian nagari, meningkatkan pengelolaan potensi nagari sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nagari. Keberadaan Badan Usaha Milik Nagari menjadi salah satu penanda kemajuan pembangunan suatu nagari. Karena keberadaan lembaga tersebut mengisyaratkan sumber pendapatan nagari tidak bergantung pada negara semata, tetapi juga ada pendapatan nagari. Namun sangat disayangkan keberadaan BUMNag tidak dimiliki oleh semua nagari, padahal BUMNag tersebut dapat membuat sebuah masyarakat nagari menjadi mandiri dan lebih produktif dalam

melihat kesempatan yang ada. Keberadaan BUMNag sejatinya sangat membantu masyarakat, karena usaha yang dijalankan dapat dirasakan manfaatnya bersama.

Dikutip dari Gatra, 928 nagari dan desa yang ada di Sumatera Barat ternyata belum keseluruhannya memiliki Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), salah satu alasan yang paling umum ialah, karena tidak mengetahui potensi apa yang bisa diolah atau dimanfaatkan ([www.gatra.com](http://www.gatra.com)). Tercatat jumlah nagari atau desa yang belum mendirikan BUMNag dan BUMDes sebanyak 205 nagari dan desa ([Sumbar.Antaraneews.com](http://Sumbar.Antaraneews.com)). Sedangkan untuk Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tercatat 47 Badan Usaha Milik Nagari yang sudah didirikan dari 79 nagari yang ada. Dari 47 BUMNag tersebut masih dalam klasifikasi rintisan karena rata-rata BUMNag yang ada baru didirikan pada tahun 2018.



**Tabel 1.1****Daftar BUMNag Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020**

No	Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah BUMNag
1	Suliki	6	4
2	Lareh Sago Halaban	8	5
3	Luak	4	4
4	Gunuang Omeh	3	3
5	Bukik Barisan	5	4
6	Payakumbuh	7	6
7	Mungka	5	1
8	Guguak	5	4
9	Harau	11	5
10	Situjuh	5	2
11	Akabiluru	7	7
12	Kapur IX	7	1
13	Pangkalan	6	1

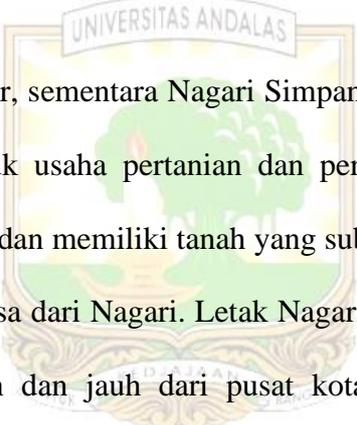
Sumber: DPMD Kabupaten Lima Puluh Kota, 2020

Dari daftar BUMNag di atas, maka dapat dilihat bahwa belum semua nagari memiliki BUMNag. Hal tersebut tentu dipengaruhi banyak faktor, seperti pemerintah nagari sebagai pendorong yang kurang mampu mensosialisasikan pentingnya BUMNag, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, kurangnya etos kerja masyarakat, ataupun modal sosial yang dimiliki pemerintah nagari dan masyarakat. Dalam pendirian BUMNag itu sendiri banyak hal yang harus disiapkan, diantaranya adalah sumber daya manusia yang kompeten, kesiapan administrasi, kemampuan manajemen, dan yang paling penting adalah kemauan yang kuat untuk mengelola BUMNag.

Dari beberapa BUMNag yang ada Di Sumatera Barat, yang menjadi fokus penelitian ini adalah BUMNag Zigiran Mandiri di Nagari Simpang sugiran,

Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Melihat letaknya yang jauh dari pusat kota, tidak membuat nagari ini tertinggal. Istilah nagari yang tidak berkembang dan terisolir tidak berlaku untuk Nagari Simpang Sugiran yang berada di kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Nagari Simpang Sugiran kini sudah dapat dikatakan sebagai salah satu nagari yang maju dalam hal pembangunan perekonomiannya, salah satu buktinya dapat dilihat dari keberhasilannya dalam pengelolaan BUMNag, disaat masih banyaknya nagari lain yang belum mendirikan BUMNag.

Pendirian Badan Usaha Milik Nagari di Simpang Sugiran dilatar belakangi oleh beberapa hal, diantaranya:

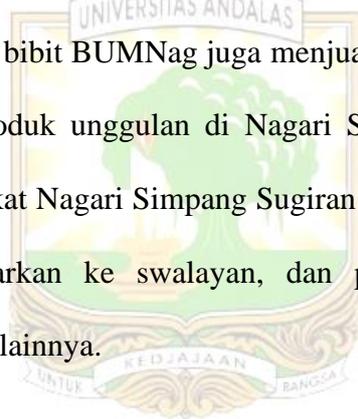
- 
- a. Banyaknya lahan tidur, sementara Nagari Simpang Sugiran merupakan daerah yang berpotensi untuk usaha pertanian dan perkebunan karena wilayahnya berada di perbukitan, dan memiliki tanah yang subur
  - b. Jauhnya pelayanan jasa dari Nagari. Letak Nagari Simpang Sugiran yang jauh dari pusat keramaian dan jauh dari pusat kota, menyebabkan masyarakat nagari kesulitan dalam hal pelayanan jasa, seperti keberadaan mesin ATM yang jauh dari nagari. Keberadaan pelayanan jasa Bank Mini oleh BUMNag Simpang Sugiran tentu sangat membantu masyarakat setempat.
  - c. Banyaknya peredaran uang di luar Nagari. Sebelum didirikannya BUMNag Simpang Sugiran masyarakat memenuhi kebutuhan hidup bergantung dengan nagari lain.
  - d. Susahnya menggunakan teknologi dan informasi. Keberadaan nagari yang berada di perbukitan, menyebabkan sulitnya akses internet. Hal tersebut tentu membuat masyarakat kesulitan untuk menggunakan teknologi seperti Android dan sejenisnya serta sulitnya mengakses informasi.

Didirikannya Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Simpang Sugiran mengacu pada Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 4 tahun 2015. Modal awal mulai dikembangkannya BUMNag tahun 2017 hanya berjumlah 20 juta rupiah, tahun 2018 Pemerintah Nagari Simpang Sugiran menambah penyertaan modal sebesar 100 juta rupiah. Ditahun yang sama Kemendes juga memberikan modal sebanyak 50 juta rupiah. Dan Pada tahun 2019 Pemerintah Nagari kembali memberi anggaran untuk pengembangan pengelolaan BUMNag sebesar 50 juta rupiah. Dari modal tersebut dan kemampuan Pemerintah Nagari dan pengurus BUMNag Simpang Sugiran dalam mengelola BUMNag telah mengantarkan BUMNag Simpang Sugiran menjadi maju, dibandingkan nagari lain.

Kehidupan masyarakat Nagari Simpang yang sejahtera tidak terlepas dari keberadaan BUMNag. Semenjak didirikan pada tahun 2017, BUMNag Simpang Sugiran telah mampu memasok kebutuhan masyarakat nagari. Untuk bidang usaha yang dikelola BUMNag Simpang Sugiran diantaranya adalah bidang pertanian, perdagangan, dan telekomunikasi. Di samping peran penting Pemerintah Nagari, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai juga menjadi pendukung jalannya ketiga bidang usaha pada BUMNag tersebut. Keberhasilan BUMNag Simpang Sugiran juga telah membawa BUMNag tersebut mewakili BUMNag yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penilaian Badan Usaha Milik Nagari tingkat Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019. Selain meraih prestasi nomor satu BUMNag terbaik di kabupaten Lima Puluh Kota, BUMNag Simpang Sugiran juga berhasil meraih nomor empat dalam penilaian BUMNag terbaik ditingkat Provinsi Sumatera Barat.

Dibidang pertanian dan perdagangan, BUMNag Simpang Sugiran melakukan jual beli hasil pertanian. BUMNag Simpang Sugiran membeli hasil ladang dari masyarakat terutama berupa jagung, yang kemudian dijual kembali kepada peternak ayam. Sehingga jual beli tersebut dapat mendongkrak hasil pertanian di Nagari Simpang sugiran. Profesi masyarakat Nagari Simpang Sugiran yang rata-rata bermata pencaharian sebagai petani, menjadi peluang bagi mereka untuk mensejahterahkan kehidupannya. Di Nagari Simpang Sugiran pemerintah nagari sangat mendukung, dan turut membantu memajukan kegiatan pertanian. Karena pertanian merupakan sumber potensi bagi Nagari Simpang Sugiran.

BUMNag Simpang Sugiran juga melakukan usaha penjualan bibit pertanian untuk masyarakat setempat. Selain bibit BUMNag juga menjual buah naga, yang mana buah naga ditetapkan sebagai produk unggulan di Nagari Simpang Sugiran. Buah naga tersebut dibeli dari masyarakat Nagari Simpang Sugiran yang nantinya dijual kembali oleh BUMNag dan dipasarkan ke swalayan, dan pasar-pasar lain di Padang, Pekanbaru, Batam, dan kota lainnya.



Selain Buah naga, BUMNag Simpang Sugiran juga mengembangkan pengelolaan komoditas rempah yaitu buah pala. Prospek pengembangan buah pala ini sangat menjanjikan untuk komoditas ekspor. Saat ini BUMNag Simpang Sugiran sudah menjalin kerjasama dengan KADIN Sumatera Barat untuk pemasaran bibit. Untuk tahap awal pengurus BUMNag Simpang Sugiran telah menanam 300 batang buah pala sebagai percontohan di lahan pengurus BUMNag.

Kemudian pada bidang pelayanan jasa, BUMNag Simpang Sugiran menyediakan akses bank mini, yang memudahkan masyarakat untuk keperluan perbankan, seperti transfer antar bank, tarik tunai, dan lainnya. Sedangkan pada bidang telekomunikasi

BUMNag Simpang Sugiran menyediakan kebutuhan internet bagi masyarakatnya, mengingat akses internet yang sangat penting di tengah kehidupan yang semakin maju. Akses internet tersebut dapat digunakan oleh seluruh masyarakat nagari Simpang Sugiran.

Letak Nagari Simpang Sugiran yang dikelilingi perbukitan dan di perkampungan serta tidak adanya tower telekomunikasi, menyebabkan sulitnya akses internet. Maka dari itu pada tahun 2018 pemerintah nagari memasang pemancar sinyal internet, dan BUMNag yang mengelola penjualan voucher internet. Diakui masyarakat dengan keberadaan BUMNag tersebut sangat membantu kehidupan masyarakat, termasuk kemudahan bagi masyarakat Simpang Sugiran untuk mengakses jaringan internet. Akses jaringan internet yang lancar lebih memudahkan masyarakat untuk mengembangkan dirinya, dan tentunya dimanfaatkan untuk membuat nagarinya lebih maju.

Kemajuan tersebut tentu tidak terlepas dari peran Pemerintah Nagari dan kerjasama yang terjalin dengan masyarakat. Wali Nagari sebagai dewan penasehat pada struktur kepengurusan BUMNag, memiliki peran yang besar. Wali Nagari harus memiliki visi misi yang sama dengan masyarakat serta pengurus BUMNag dalam pengelolaan BUMNag. Keberadaan BUMNag merupakan bentuk Pemerintah Nagari dalam merealisasikan pembangunan dengan mengembangkan potensi Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Faktor lain dari kemajuan nagari Simpang sugiran adalah adanya transparansi pelayanan publik termasuk dalam hal dana yang dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk kemajuan Nagari Simpang sugiran. Di samping itu Pemerintah Nagari Simpang Sugiran juga berhasil dengan programnya terkait pemberdayaan masyarakat. Masyarakat disosialisasikan, agar menjadi

masyarakat yang kreatif dan berinovasi sehingga terciptalah sumber daya manusia yang berkompeten.

Adapun fokus dari Penelitian ini adalah menggali bagaimana dukungan Pemerintah Nagari Simpang Sugiran dalam keberhasilan BUMNag yang dikelolanya. Apakah keberadaan pemerintah nagari sangat diperlukan untuk menjalankan BUMNag tersebut. Mengingat BUMNag yang dikelola oleh pemerintah nagari, dan masyarakat nagari Simpang Sugiran menjadi salah satu BUMNag yang sampai saat ini masih aktif di Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu penelitian ini juga fokus menggali kebijakan apa dan bagaimana kontribusi dari Pemerintah Nagari Simpang Sugiran terhadap pengelolaan BUMNag.

## **2. Rumusan Masalah**

Dilihat dari latar belakang tersebut, maka dapat dilihat bahwa keberadaan BUMNag dinilai penting dalam suatu nagari untuk memajukan pembangunan nagari. Selain peran masyarakat dalam pengelolaannya tentu juga sangat dibutuhkan peran Pemerintah Nagari (Wali Nagari dan perangkat nagari lainnya) yang dikoordinasikan dengan berbagai pihak terkait. Nagari Simpang Sugiran telah membuktikan menjadi nagari yang maju dan mampu mengelola pendapatan nagarinya sendiri. Stigma nagari Simpang Sugiran yang dahulunya sempat tertinggal dibandingkan nagari lainnya yang ada di Kabupaten Lima puluh kota, kini sudah melahirkan beragam prestasi, baik itu di tingkat kabupaten, maupun ditingkat provinsi. Salah satu prestasi yang sungguh dibanggakan yaitu keberhasilan pemerintah nagari dalam mempertahankan keberadaan BUMNag, karena tidak semua nagari yang ada di Sumatera Barat berhasil dalam mengelola BUMNag.

Berbicara mengenai peran maka tidak terlepas dengan posisi dan status seseorang dalam lembaga, organisasi, dan lainnya. Pemerintah Nagari (wali nagari, dan perangkat nagari lainnya) yang memiliki kedudukan tinggi pada ruang lingkup nagari dan memiliki peran penting untuk memajukan pembangunan nagari termasuk dalam pendirian BUMNag. Berperannya pemerintah nagari Simpang Sugiran dan dukungan yang bersinergi dengan pihak-pihak terkait terbukti membawa keberhasilan. BUMNag yang dikelola mengalami kemajuan semenjak didirikan pada tahun 2017, dan menjadi salah satu BUMNag yang sampai saat ini aktif di Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota. Maka dari uraian diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana dukungan pemerintah nagari dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari Zigiran Mandiri di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota?”**.

### 3. Tujuan Penelitian

#### a. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah nagari dan dukungannya dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang maju, dan mampu mengelola potensi Sumber daya, serta menjadi penggerak pembangunan ekonomi nagari.

#### b. Tujuan Khusus

1. Mengetahui kontribusi pemerintah nagari terkait pengelolaan BUMNag di Nagari Simpang Sugiran.
2. Mengetahui upaya pemerintah nagari dalam mendukung permodalan BUMNag di nagari Simpang Sugiran.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan untuk peningkatan kapasitas pengurus BUMNag di nagari Simpang Sugiran.

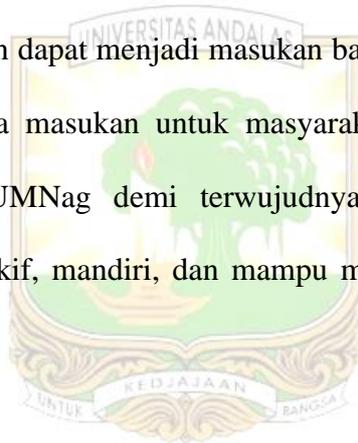
#### **4. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis. Dengan harapan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai kebijakan, dan sistem pelayanan birokrasi oleh pemerintah nagari dalam pembangunan nagari, khususnya pengelolaan BUMNag sebagai lembaga perekonomian di suatu nagari. Selain itu penulis juga berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan dan sebagai literatur untuk penelitian di masa yang akan datang.

##### **b. Manfaat praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak Pemerintahan nagari atau desa lainnya, serta masukan untuk masyarakat agar dapat bekerja sama dalam pengelolaan BUMNag demi terwujudnya pembangunan yang maju, masyarakat yang produktif, mandiri, dan mampu memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki.



#### **5. Tinjauan Pustaka**

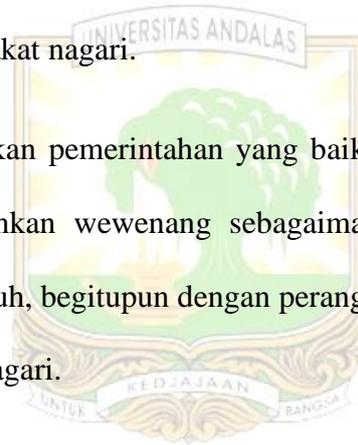
##### **5.1 Pemerintahan Nagari dan Peranannya**

Sebagaimana yang tertuang pada peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang nagari, telah dijelaskan bahwa pemerintahan nagari merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat nagari dalam suatu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sama halnya dengan Pemerintahan Desa, Pemerintahan Nagari adalah wujud otonomi daerah dan menjadi pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari yang memegang kendali nagari adalah Pemerintah Nagari, yaitu Wali Nagari yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat nagari.

Wali nagari sebagai pemimpin tertinggi di nagari memiliki wewenang, diantaranya:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan nagari
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat nagari
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset nagari
- d. Menetapkan peraturan nagari
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja nagari
- f. Membina kehidupan masyarakat nagari
- g. Membina kehidupan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan
- h. Membina, melestarikan dan mengembangkan kehidupan sosial budaya dan adat-istiadat masyarakat nagari.

Maka demi mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pemerintahan nagari, wali nagari harus menjalankan wewenang sebagaimana yang disebutkan di atas dengan tanggung jawab penuh, begitupun dengan perangkat nagari lainnya yang harus membantu tugas dari wali nagari.



Berangkat dari pemerintahan nagari yang baik, tentu akan berdampak pada kemajuan nagari, termasuk menjadikan pembangunan nagari yang berkualitas. Hal tersebut dikarenakan akar dari majunya pembangunan nagari berasal dari pemerintah nagari, begitupun dalam pengelolaan BUMNag yang dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu nagari. Maka dalam melihat keberhasilan BUMNag, peneliti perlu mengamati pelayanan pemerintah nagari dari nagari terkait.

Keberadaan Pemerintah Nagari (wali nagari dan perangkat nagari) sebagai penyelenggara pemerintahan memiliki tugas mulai dari menyelenggarakan pemerintahan nagari, melaksanakan urusan pembangunan nagari, melaksanakan

urusan keuangan dan pendapatan nagari, dan turut serta melaksanakan urusan kemasyarakatan nagari. Maka dalam pelaksanaan tugas tersebut pemerintah nagari (wali nagari dan perangkat nagari) memiliki peran penting sesuai dengan posisi atau kedudukannya dimasyarakat.

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 10 tahun 2007, telah dipertegas bahwa pemerintahan nagari memiliki wewenang untuk membangun daerahnya masing-masing, keberhasilan peran pemerintah nagari dalam menjalankan tugasnya dapat dijadikan indikator mengukur keberhasilan fungsi dari pemerintahan nagari. Jika tugas tersebut terlaksana dengan baik, maka dapat dikatakan fungsi pemerintahan nagari berjalan sebagaimana mestinya, dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

## **5.2 Konsep Pembangunan Nagari**

Pembangunan nagari merupakan salah satu indikator dari pembangunan nasional, sehingga pembangunan nagari menjadi agenda utama bagi pemerintah, dan tidak dapat dianggap sebelah mata. Menurut Adi Sasmita Raharjo (2006) pembangunan nagari adalah seluruh pembangunan di Nagari yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan dengan sistem gotong royong. Pembangunan nagari bermakna sebagai upaya peningkatan taraf kehidupan masyarakat nagari sehingga menjadikan masyarakat lebih mandiri dan meningkatkan rasa percaya diri. Prioritas utama dari pelaksanaan pembangunan nagari adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Deaton dan Nelson juga turut memperjelas apa yang dimaksud dengan pembangunan perdesaan (Nagari Bagi Masyarakat Minangkabau), yang diartikan sebagai alokasi fisik, sosial dan sumber daya manusia dalam pola spasial yang

menyediakan kemungkinan Memperoleh pendapatan bagi keluarga, pendidikan kewirausahaan, dan tenaga kerja, akses pelayanan kesehatan, pengembangan perekonomian, kepemimpinan dan struktur organisasi yang dapat menjamin ekonomi dan kesehatan sosial, serta lingkungan dan sumber daya alam yang sehat.

Nagari memiliki potensi alam yang luar biasa, sehingga sangat disayangkan jika potensi tersebut tidak dimaksimalkan dengan baik. Pengelolaan potensi sumber daya alam yang dimiliki nagari dapat mendorong perubahan yang lebih baik bagi nagari yang bersangkutan, termasuk di dalamnya kesejahteraan masyarakat nagari. Adapun beberapa sasaran dari pembangunan nagari:

1. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat nagari, melalui program BUMNag, serta pengelolaan produksi hasil pertanian.
2. Pembangunan sumber daya manusia, dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pembentukan modal sosial budaya masyarakat nagari
3. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan.

### **5.3 Konsep Badan Usaha Milik Nagari**

Salah satu program unggulan pemerintah menuju nagari mandiri adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Nagari atau yang disingkat dengan BUMNag. BUMNag merupakan lembaga usaha nagari yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Nagari yang berorientasi untuk memperkuat perekonomian nagari yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi sumber daya. Pendirian BUMNag mengacu pada Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 213 ayat 1 “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.

Beberapa Hal yang Diperlukan dalam Pendirian BUMNag:

- a. BUMNag Membutuhkan Modal Sosial.

Adapun modal sosial yang dimaksud adalah kerjasama, solidaritas, dan kepercayaan untuk menjangkau jejaring sosial yang lebih luas.

- b. BUMNag salah satu bentuk usaha ekonomi nagari yang bersifat kolektif antara pemerintah nagari dengan masyarakat nagari. Adapun unsur didalamnya terdapat bisnis sosial dan bisnis ekonomi.

- c. BUMNag menjadi badan usaha yang dimandatkan undang-undang desa atau nagari bagi Provinsi Sumatera Barat. Pendirian BUMNag memprioritaskan untuk menampung kegiatan masyarakat dibidang ekonomi atau pelayanan umum atau kerja sama antar nagari.

- d. BUMNag menjadi arena pembelajaran bagi masyarakat nagari. Diantara pembelajaran yang dapat diperoleh dari keberadaan BUMNag adalah kemampuan manajerial, kewirausahaan, tata kelola nagari yang baik, kepemimpinan, dan kepercayaan.

- e. BUMNag melakukan transformasi terhadap program yang dirancang oleh pemerintah (*Government driven*; proyek pemerintah) menjadi milik desa.

BUMNag menjadi salah satu lembaga perekonomian yang berbadan hukum, status kepemilikannya dimiliki oleh pemerintah nagari. Dalam pelaksanaan BUMNag pemerintah mengimplementasikannya sesuai dengan peraturan daerah (perda) tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMNag. Peraturan tersebut bersifat *mandatory*, yang artinya pengelolaan BUMNag disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Pendirian BUMNag tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga berorientasi pada manfaat sosial, dan manfaat non-ekonomi lainnya.

Sama halnya dengan pendirian badan usaha yang lain, Pemerintah juga menetapkan langkah-langkah prosedural dan teknokratik dalam pendirian BUMNag, sehingga BUMnag tersebut dapat sejalan dengan usaha ekonomi nagari dan demokratisasi nagari. Adapun langkah-langkah yang dimaksud diantaranya adalah:

#### 1. Tahap Sosialisasi Tentang BUMNag

Sosialisasi ini dapat dilakukan oleh pemerintah nagari dengan masyarakat nagari, baik secara langsung ataupun melalui kerjasama dengan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa). Tujuan dari sosialisasi tersebut adalah, masyarakat dapat memahami apa itu BUMNag, tujuan didirikannya BUMNag, manfaat yang diperoleh dari keberadaan BUMNag. Sehingga hasil dari sosialisasi pemerintah nagari mengenai BUMNag diharapkan masyarakat tertarik dan turut berpartisipasi dalam pengelolaan BUMnag

#### 2. Tahap Pelaksanaan Musyawarah Nagari

Pendirian BUMnag merupakan cara strategis pemerintah nagari untuk membangun nagari yang mandiri, maka dari itu BUMNag perlu dibahas dalam musyawarah nagari bersama pemerintah nagari, masyarakat, dan BPD. Dalam musyawarah tersebut diharapkan dapat mengelaborasi hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan BUMNag secara partisipatif, demokratis, transparan, dan akuntabel serta menimbang hak, dan kewajiban masyarakat.

Beberapa yang perlu diperhatikan dalam tahap musyawarah nagari adalah:

- a. Menemukan potensi desa yang dapat dikembangkan
- b. Mengenali kebutuhan masyarakat nagari ataupun luar nagari

- c. Menentukan klasifikasi jenis usaha yang akan dikembangkan, apakah jenis pelayanan (*servicing*), bisnis sosial (*social business*), bisnis penyewaan (*renting*), usaha perantara (*brokering*), bisnis yang memproduksi dan berdagang, atau bisnis keuangan (*financial business*), usaha bersama (*holding*)
- d. Membahas organisasi pengelola BUMNag (struktur organisasi dan nama pengurus). Tujuannya agar pengurus mendapatkan legitimasi penuh dari masyarakat nagari.
- e. Membahas modal usaha BUMNag, yang mana modal awal BUMNag berasal dari dana APBN

### 3. Penetapan Peraturan tentang pendirian BUMNag

Tahap terakhir adalah menetapkan peraturan pendirian Badan Usaha Milik Nagari yang mengacu pada Undang-undang Desa, peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

## 5.4 Tinjauan Sosiologi

Penelitian ini menggunakan teori Modal Sosial. Peranan pemerintah nagari yang berhasil membawa Badan Usaha Milik Nagari menjadi sukses dapat dikaitkan dengan kepemilikan modal sosial yang ada, terutama modal sosial dari pemerintah nagari sebagai penggerak pembangunan nagari, termasuk dalam menjalankan BUMNag tersebut. Agar dapat memahami keberlangsungan sebuah struktur dan cara berfungsinya maka diperlukan modal. Dalam hal ini modal yang dimaksud bukan hanya dari segi modal ekonomi saja, tetapi juga mencakup modal sosial.

Berbicara mengenai defenisi modal sosial sangat banyak dikemukakan oleh para ahli, salah satunya pemikiran dari Robert MZ Lawang seorang Sosiolog Indonesia. Menurut Robert MZ Lawang (dalam Damsar 2011:210) modal sosial merupakan

semua kekuatan sosial komunitas yang dikonstruksikan oleh individu ataupun kelompok yang mengacu pada struktur sosial yang menurut penilaian mereka dapat mencapai tujuan individual dan atau kelompok secara efisien dan efektif dengan modal sosial lainnya. Modal sosial merujuk pada ikatan sosial atau dapat juga disebut sebagai jaringan sosial. Ikatan tersebut menunjukkan betapa pentingnya jaringan sosial dalam membangun kerjasama untuk memperoleh manfaat.

Modal sosial muncul ditengah kesadaran bahwa masyarakat tidak mampu menyelesaikan permasalahannya secara individu, maka dari itu diperlukan kerjasama antara masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Modal sosial memiliki kontribusi penting dalam perkembangan pembangunan. Modal sosial berfungsi mendorong terciptanya kerjasama dalam masyarakat. Selain itu modal sosial juga mampu menciptakan rumusan kebijakan mengenai langkah tepat yang harus diambil pemerintah dan masyarakat dalam proses pembangunan.

Diantara unsur penting dalam membangun modal sosial adalah:

1. Kepercayaan

Menurut Robert MZ Lawang (2004:36) kepercayaan merupakan hubungan antara dua belah pihak atau lebih yang mengandung harapan yang menguntungkan salah satu pihak atau kedua belah pihak melalui interaksi sosial. Adanya kepercayaan mampu memperbesar peluang individu ataupun kelompok untuk bekerjasama. Dalam pengelolaan BUMNag di Nagari Simpang Sugiran antara pemerintah nagari dan pengurus BUMNag saling menaruh kepercayaan terhadap jalannya BUMNag tersebut sehingga diantaranya tidak ada keraguan dan dapat saling membantu demi keberlangsungan BUMNag di nagari Simpang Sugiran.

## 2. Jaringan

Istilah jaringan merupakan terjemahan dari *network*, yang berasal dari kata net dan work. Net diartikan sebagai simpul yang saling berhubungan, sedangkan work mempunyai arti kerja. Berdasarkan arti kata tersebut Robert MZ Lawang mendefinisikan jaringan dalam beberapa bentuk diantaranya

- a. Kedua belah pihak yang di dalamnya terdapat hubungan sosial dan diikat kepercayaan.
- b. Hubungan sosial yang terjalin membentuk kerjasama.
- c. Kerja yang terjalin antar simpul akan menjadi kuat.
- d. Simpul menjadi satu kesatuan yang salah satu bagiannya tidak dapat terlepas, karena jika salah satunya hilang berdampak pada jaring lainnya sehingga tidak berfungsi dengan baik.

Dalam pengelolaan BUMNag yang dimaksud dengan jaringan adalah kerjasama yang dibentuk dari berbagai pihak yang mendorong keberhasilan BUMNag, mulai dari Wali Nagari, perangkat nagari, pengurus BUMNag, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya.

## 3. Norma

Dalam modal sosial, norma menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari unsur kepercayaan dan jaringan. Norma dianggap sebagai aturan yang harus dipahami dan dijalankan bersama yang menuntun perilaku seseorang.

Melihat uraian teori di atas, keberhasilan Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Simpang Sugiran tentu juga tidak terlepas dari modal sosial yang digunakan, baik itu relasi yang dibangun oleh Pemerintah Nagari, pengurus, maupun dari masyarakat

Nagari Simpang sugiran. Pengelolaan BUMNag akan sulit berkembang jika tidak dibarengi kerjasama yang baik. Modal sosial menjadi sumber daya yang berkembang pada individu atau kelompok yang meliputi jaringan, kepercayaan, nilai, dan norma, sebagai unsur penting menjalin kerjasama.

Kepercayaan yang dibangun dari berbagai pihak, baik yang terlibat secara langsung ataupun secara tidak langsung dalam pengelolaan BUMNag sangat dibutuhkan. Begitupun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah nagari sebagai perumus kebijakan atau menetapkan peraturan terkait pengembangan pembangunan nagari termasuk didalamnya pengelolaan BUMNag. Berangkat dari kepercayaan tersebut maka akan melahirkan jaringan yang kuat, sehingga dapat mempermudah kerjasama, dan memperoleh keuntungan.

## 5.5 Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan penelitian terdahulu yang menjadi rujukan untuk penulisan penelitian ini. Beberapa penelitian relevan yang dapat dijadikan rujukan sesuai dengan topik penelitian ini diantaranya adalah, penelitian oleh **Munawaroh (2019), yang berjudul Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Majasari Kecamatan Sliyeg kabupaten Indramayu)**. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan keberadan BUMDes yang didirikan oleh pemerintah telah membuat masyarakat lebih mandiri. Pemerintah melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat Desa Majasari dengan cara pelatihan-pelatihan. Kemudian ilmu yang didapat dari pelatihan tersebut diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini juga membahas bagaimana pengelolaan BUMDes, yang mana dalam pelaksanaannya masyarakat selalu berkoordinasi dengan pengurus BUMDes terkait program-program yang dilaksanakan masyarakat, sedangkan pengurus BUMDes sebagai pengawas akan mengontrol jalannya program tersebut.

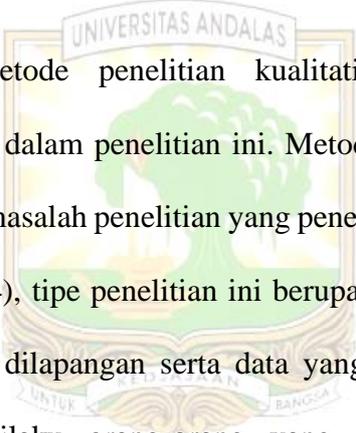
Penelitian kedua oleh **Rinda Hasraty Ilyas (2018)**, yang berjudul **Sinergitas Stakeholders Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Nagari Tunas Jaya Sasak Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat**. Hasil penelitian menunjukkan struktur BUMNag yang terdiri dari lima unit, yaitu unit pemberdayaan usaha masyarakat, unit usaha perikanan, unit perkebunan, unit usaha perdagangan, dan unit usaha kontruksi yang dalam pelaksanaan mengelola BUMNag bersinergi dengan Pemerintah Nagari serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari. Pentingnya sinergi Pemerintah Nagari dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dikarenakan lembaga yang dikelola butuh bimbingan teknis dalam pengembangannya. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan sinergitas terbentuk atas komunikasi dan koordinasi dari berbagai pihak.

Penelitian selanjutnya oleh **Putria Angela, Fatmariza, Al Rafni (2018)** yang berjudul **Nagari Berprestasi: Strategi Kepemimpinan Wali Nagari dan Peran Masyarakat Di Nagari Pandai Sikek**. Hasil penelitian tersebut menunjukkan dibalik keberhasilan Nagari Pandai Sikek menjadi nagari berprestasi tingkat nasional, ada strategi yang dimainkan oleh wali nagarinya, strategi yang dimaksud diantaranya adalah bekerjasama dengan berbagai pihak sebelum mengambil keputusan, melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan nagari, memotivasi masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas SDM, dan yang terakhir dengan meningkatkan komunikasi antar masyarakat. Selain strategi dari wali nagari maka juga harus ada aksi dari masyarakatnya agar dapat sepenuhnya berpartisipasi untuk mendukung program-program yang telah dibuat.

## **6. Metodologi Penelitian**

### **6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin (2003:4) metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Sedangkan menurut Afrizal (2014:13) metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan ataupun tulisan) dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. Data yang akan diperoleh dengan menggunakan metode penelitian ini berupa gambaran, penjelasan, deskripsi kata-kata dan tindakan yang dilakukan informan.



Alasan penggunaan metode penelitian kualitatif karena didasarkan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Metode penelitian kualitatif dirasa lebih tepat untuk menjawab masalah penelitian yang peneliti lakukan. Menurut Bogdan dan Taylor (Moloeng 2011:4), tipe penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena yang terjadi dilapangan serta data yang diperoleh berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang yang diamati. Metode ini dapat mengungkapkan proses kejadian secara mendetail. Maka dari itu Peneliti menggunakan pendekatan ini dikarenakan peneliti ingin mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan mengamati dengan lebih detail terkait peran dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah nagari terkait keberhasilannya dalam pengelolaan BUMNag di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **6.2 Informan Penelitian**

Menurut Afrizal (2014:139) informan penelitian ialah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Sedangkan menurut Moleong (2004:132) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan sangat diperlukan untuk mendapatkan informasi sedetail mungkin dalam penelitian kualitatif. Informan harus mempunyai banyak pengetahuan tentang latar penelitian maka dalam hal ini informan secara sukarela dapat digolongkan menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal.

Afrizal (2014:139), membagi dua kategori informan penelitian, diantaranya adalah:

### **1. Informan Pengamat**

Informan pengamat ialah pihak yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Informan pengamat bisa saja bukan orang yang diteliti namun informan tersebut harus mengetahui orang yang diteliti atau pelaku kejadian yang diteliti atau mereka dapat disebut sebagai saksi suatu kejadian. Orang yang menjadi informan pengamat dalam penelitian ini adalah, masyarakat Nagari Simpang Sugiran yang mengetahui, namun tidak terlibat langsung dalam pengelolaan BUMNag di Nagari Simpang sugiran, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **2. Informan Pelaku**

Informan pelaku adalah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya

(maksudnya) atau tentang pengetahuannya. Mereka yang menjadi informan pelaku menjadi subjek penelitian itu sendiri. Orang yang menjadi informan pelaku dalam penelitian ini adalah pemerintah nagari (wali nagari, dan perangkat nagari lainnya), pengurus BUMNag yang terlibat langsung dalam pengelolaan BUMNag di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh kota.

Dalam penentuan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan cara menetapkan kriteria yang ditetapkan peneliti yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan informan. Peneliti juga telah mengetahui terkait identitas pihak-pihak yang akan dijadikan informan penelitian sebelum dilakukannya penelitian. Teknik ini disebut juga sebagai mekanisme disengaja.

Informan dalam penelitian ini diantaranya ialah:

1. Pemerintah Nagari (wali nagari dan perangkat lainnya)
2. Pengurus BUMNag Simpang Sugiran
3. Masyarakat Nagari Simpang Sugiran yang terlibat dalam pengelolaan BUMNag di Simpang Sugiran.

Untuk lebih jelasnya berikut nama-nama Informan dalam penelitian yang diangkat, diantaranya adalah:

**Tabel 1.2**  
**Identitas Informan Penelitian**

No	Nama	Umur (Th)	Jenis Kelamin	Jabatan/ Pekerjaan	Kategori Informan
1	Liza Hanafia, S.T	39	Perempuan	Direktur BUMNAG	Pengurus BUMNag
2	Gita Erdia	31	Perempuan	Kepala Unit Jasa dan	Pengurus BUMNag

				Telekomunikasi BUMNag	
3	Ade Putra, A.Md	34	Laki-Laki	Sekretaris Nagari	Perangkat Nagari
4	Windi	25	Perempuan	Staf kasi Pelayanan dan Kesejahteraan	Perangkat Nagari
5	Dt. Azwan	76	Laki-Laki	Ketua BAMUS	Tokoh Masyarakat
6	Citra Sari	34	Perempuan	Staf TU dan Umum	Perangkat Nagari
7	Dendi Erianto	46	Laki-Laki	Kepala Jorong Lokuang	Perangkat Nagari
8	Iswaris Chan	55	Laki-Laki	Wali Nagari periode 2014-2019, dan Penasehat BUMNag periode 2017-2019	Tokoh Masyarakat

Sumber: Data Primer 2020-2021

Berdasarkan tabel di atas informan dalam penelitian ini berjumlah delapan orang yang terdiri dari enam informan pelaku, dan dua informan pengamat. Informan tersebut secara tidak langsung terlibat dalam penelitian ini dan dijadikan sebagai salah satu cara mendapatkan informasi terkait seputar topik penelitian yang diangkat, yaitu dengan melakukan wawancara kepada informan. Informan yang ditetapkan memenuhi kriteria atau dengan kata lain informan paham atau bahkan terlibat langsung dalam pengelolaan BUMNag Zigiran Mandiri di Nagari Simpang Sugiran

### 6.3 Data yang Diambil

Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2004: 112), menyebutkan sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Sedangkan yang lainnya hanyalah data tambahan berupa dokumen, dan lain-lain. Adapun sumber data dalam penelitian ini, diperoleh melalui:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data atau informasi yang didapatkan langsung dari informan penelitian dilapangan. Data primer dapat diperoleh dengan cara menggunakan teknik observasi/pengamatan dan wawancara mendalam (Moleong, 2004:155). Data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan informan terkait dukungan pemerintah nagari dalam pengelolaan BUMNag Zigiran Mandiri di Nagari Simpang Sugiran.

#### 2. Data sekunder

Data Sekunder merupakan data berupa dokumen yang berisi mengenai informasi tentang penelitian yang diangkat. Dokumen tersebut dapat berupa data dari kelurahan/nagari, kecamatan, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Data sekunder diperoleh dalam bentuk sudah jadi melalui publikasi atau informasi yang dikeluarkan di berbagai organisasi atau perusahaan (Ruslan, 2010: 29-30). Data sekunder berguna sebagai data tambahan yang diperoleh melalui penelitian pustaka yakni pengumpulan data yang bersifat teori yang berupa pembahasan tentang bahan tertulis, literatur hasil penelitian (Moleong, 2004 : 159). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari Kantor Wali Nagari Simpang Sugiran mengenai pembangunan nagari termasuk pengelolaan BUMNag di Nagari Simpang Sugiran.

Adapun data sekunder yang dimaksud ialah:

##### a. Profil Nagari Simpang Sugiran

- b. Profil BUMNag Zigiran Mandiri Nagari Simpang Sugiran
- c. AD/ART BUMNag Zigiran Mandiri
- d. Dokumentasi prestasi BUMNag
- e. Media online (Langgam.id, kabarsumbar.com, nusantaraexpress.com, sumbarpost.com)

#### **6.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian kualitatif, peneliti menganalisis kata-kata yang menyatakan alasan-alasan, interpretasi atau makna-makna, kejadian, dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara individu, ataupun kelompok sosial. Maka untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk mendapat kata-kata, dan perbuatan manusia sebanyak-banyaknya.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Wawancara Mendalam**

Peneliti melakukan wawancara berdasarkan pertanyaan umum yang kemudian didetailkan dan dikembangkan ketika melakukan wawancara atau setelah melakukan wawancara untuk melakukan wawancara berikutnya. Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu sudah mempersiapkan daftar pertanyaan (pedoman wawancara), namun pertanyaan tersebut tidak terperinci dan berbetuk pertanyaan terbuka, maksudnya pertanyaan yang peneliti buat tidak ada alternatif jawaban. Untuk mendalami atau mengkonfirmasi data maka peneliti melakukan wawancara dengan berulang kali, dengan mengajukan

pertanyaan yang berbeda-beda dengan informan yang sama. Teknik wawancara mendalam digunakan dalam penelitian ini agar peneliti dapat memperoleh informasi lebih mendalam tentang dukungan pemerintah nagari dalam pengelolaan BUMNag di nagari Simpang Sugiran.

Wawancara mendalam pada penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggali informasi kepada informan. Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu menyusun rancangan pertanyaan sebagai pedoman selama peneliti di lapangan, dan berguna agar wawancara lebih terarah dan sistematis. Wawancara ini tentu juga harus menjunjung nilai-nilai kesopanan, dan bertutur kata yang baik, peneliti terlebih dahulu menanyakan kesediaan informan untuk diwawancarai, apakah peneliti tidak mengganggu kegiatan informan, peneliti juga sebelumnya memperkenalkan diri serta maksud dan tujuan. Jika informan tersebut bersedia maka peneliti akan melakukan wawancara

Wawancara diawali dengan pertanyaan terkait identitas informan, seperti nama, umur, pekerjaan, dan alamat tempat tinggal. Setelah mengetahui identitas informan, peneliti mulai masuk pada topik penelitian yang diangkat, yaitu terkait dukungan pemerintah nagari terhadap pengelolaan BUMNag. Selama wawancara berlangsung peneliti menggunakan alat perekam (Handphone), pulpen, dan buku untuk menyimpan hasil wawancara.

Proses pencarian Informan dan pendekatan kepada Informan sudah dimulai semenjak bulan Oktober 2020, dengan menemui Direktur BUMNag Zigiran Mandiri Ibu Liza Hanafia, pada saat itu peneliti berkesempatan berkunjung ke kantor BUMNag Zigiran Mandiri dan menanyai informasi sebagai pedoman awal bagi peneliti melakukan penelitian. Di bulan yang sama peneliti juga bertemu dengan Wali Nagari Simpang Sugiran Bapak Erri Zulman, pada saat acara

Musrembang Nagari Simpang Sugiran. Disaat itu peneliti meminta izin melakukan penelitian di wilayah pemerintahannya. Permohonan izin tersebut masih disampaikan secara lisan, belum disertai surat. Mengetahui maksud dan tujuan peneliti, Wali Nagari Simpang Sugiran pun mengizinkan penelitian ini.

Pada bulan Desember 2020, peneliti kembali mengunjungi Nagari Simpang Sugiran, tepatnya di kantor wali nagari. Peneliti kembali meminta izin dengan membawa surat resmi sebagai pengantar izin penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian tanggal 06 januari peneliti bertemu dengan Sekretaris Nagari Simpang Sugiran, Bapak Ade Putra, pada saat itu peneliti belum melakukan wawancara berstruktur atau dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Tetapi pada saat itu informan sudah mulai bercerita terkait pengelolaan BUMNag dan bagaimana dukungan pemerintah nagari terhadap BUMNag yang didirikan sejak tahun 2017. Informan memberikan gambaran kepada Peneliti, hal tersebut tentu menambah informasi bagi peneliti yang berguna untuk penelitian yang peneliti lakukan.

Dimulai bulan Januari Peneliti mulai rutin ke lapangan guna melakukan wawancara mendalam kepada informan untuk menggali informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Pada tanggal 07 Januari 2021 peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Liza Hanafia sebagai Direktur BUMNag Zigiran Mandiri, yang mana waktu dan lokasi wawancara sudah disepakati sebelumnya dari peneliti dan juga informan. Wawancara dilakukan di kantor BUMNag Zigiran Mandiri. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan sesuai pedoman wawancara dari informan, peneliti kembali melanjutkan wawancara dengan informan berikutnya, kak Gita Erdia selaku kepala unit

pelayanan dan jasa. Kebetulan pada saat itu keadaan kantor BUMNag sepi sehingga informan bisa meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terkait topik penelitian.

Besoknya pada tanggal 08 Januari 2021 peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Nagari Simpang Sugiran Bapak Ade Putra, yang mana beliau juga masuk dalam struktur kepengurusan BUMNag secara tertulis, yaitu sebagai badan pengawas BUMNag Zigiran Mandiri. Maka dari itu informan ketiga ini mengetahui banyak hal terkait jalannya BUMNag dan bagaimana dukungannya kepada pengelolaan BUMNag.

Selanjutnya wawancara dengan informan dilakukan pada tanggal 12 Januari 2021, peneliti sampai di lokasi penelitian setelah istirahat shalat dan makan siang. Peneliti menetapkan informan secara random namun tetap sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Karena peneliti harus melihat situasi dan kondisi di lapangan, ketika sampai di kantor Wali Nagari peneliti mengamati perangkat nagari yang tidak sibuk, saat itu peneliti direkomendasikan oleh sekretaris nagari agar mewawancarai staf kasi pelayanan dan kesejahteraan bernama Windi. Peneliti pun disambut baik oleh informan dan bersedia untuk diwawancara.

Kemudian wawancara dengan informan dilanjutkan di minggu berikutnya, dikarenakan cuaca saat itu yang tidak memungkinkan peneliti untuk turun lapangan. Wawancara dengan informan berikutnya tetap dilakukan dengan cara yang sama seperti informan-informan sebelumnya. Melihat situasi dan kondisi di lapangan agar tidak mengganggu kegiatan informan.

## 2. Pengumpulan Dokumen

Peneliti mengumpulkan bahan tertulis seperti berita di media, notulen-notulen rapat, surat-menyurat, dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang

diperlukan (Afrizal 2014:21). Untuk mengecek ketepatan informasi yang didapat, peneliti juga harus mengecek kebenarannya dengan melakukan wawancara mendalam. Dokumen-dokumen tersebut dapat digunakan untuk mencocokkan informasi yang ada di lapangan.

Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud adalah:

- f. Profil Nagari Simpang Sugiran
  - g. Profil BUMNag Zigiran Mandiri Nagari Simpang Sugiran
  - h. AD/ART BUMNag Zigiran Mandiri
  - i. Dokumentasi prestasi BUMNag
  - j. Media online (Langgam.id, kabarsumbar.com, nusantaraexpress.com)
3. Observasi

Teknik lainnya yang digunakan untuk mengetahui sesuatu yang sedang terjadi atau sedang dilakukan, peneliti perlu mengamati sendiri, mendengarkan sendiri, atau merasakan sendiri (Afrizal 2014:21). Peneliti turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dengan mengamati informan menggunakan panca indera sehingga peneliti dapat memahami setiap kegiatan yang dilakukan informan. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan wali nagari, dan perangkat nagari lainnya, serta pengurus BUMNag dalam pengelolaan BUMNag di Nagari Simpang Sugiran.

Proses pengamatan dimulai ketika peneliti mulai turun lapangan, dimulai dengan keikutsertaan peneliti dalam musyawarah rencana pembangunan nagari Simpang Sugiran pada bulan Oktober 2020. Saat itu peneliti mulai mengamati bagaimana kepedulian pemerintah nagari terhadap pembangunan nagari, melihat prioritas pemerintah nagari dalam pemanfaatan dana desa. Saat musyawarah

tersebut dibahas pembangunan nagari ataupun pemberdayaan masyarakat nagari Simpang Sugiran. Musrenbang yang dilaksanakan juga dihadiri oleh ketua DPMD Kabupaten Lima Puluh Kota, ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, dan juga masyarakat. Selama musrenbang berlangsung, masyarakat aktif menyuarakan aspirasinya terkait pembangunan nagari, pemerintah nagari pun juga memberikan feedback positif dengan mendengarkan aspirasi masyarakat kemudian didiskusikan bersama dengan orang-orang yang hadir dalam musyawarah tersebut.

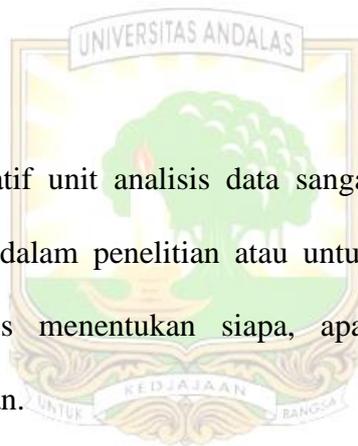
Proses observasi berikutnya peneliti mengamati situasi dan keadaan kantor BUMNag Zigiran Mandiri. Pengamatan ini dilakukan sekaligus saat peneliti melakukan wawancara dengan informan. Peneliti mengamati interaksi diantara pengurus BUMNag dengan perangkat nagari, pengurus BUMNag dengan masyarakat, dan juga diantara pengurus BUMNag. Hasil pengamatan tersebut ditulis dalam buku sebagai catatan lapangan dan tidak lupa juga didokumentasikan melalui kamera handphone.

Ketika peneliti berkunjung ke kantor BUMNag Zigiran Mandiri, peneliti disambut baik oleh pengurus BUMNag yang ada di tempat, pada hari pertama peneliti bertemu dengan Direktur BUMNag, Sekretaris BUMNag, Bendahara BUMNag, kepala unit bidang pelayanan dan jasa, dan juga masyarakat yang sedang melakukan transaksi di bank mini yang dikelola BUMNag Zigiran Mandiri. Mereka menyambut dengan senyum ramah dan mempersilahkan peneliti untuk masuk dan berbaur bersama. Pada saat itu peneliti dan pengurus BUMNag saling berbagi cerita, sembari mengamati bagaimana pelayanan pengurus BUMNag kepada masyarakat yang menggunakan jasa mereka.

Selain mengamati situasi dan kondisi di kantor BUMNag Zigiran Mandiri, peneliti juga mengamati keadaan di kantor wali nagari. Sama halnya dengan situasi saat peneliti berkunjung ke kantor BUMNag, di kantor wali nagari peneliti juga disambut baik, dan informan terlihat antusias membantu peneliti dan bersedia memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan peneliti. Selama proses turun lapangan, peneliti melihat hubungan yang baik diantara perangkat nagari, maupun hubungannya dengan pengurus BUMNag, dan yang tidak lupa peneliti juga mengamati bagaimana pelayanan perangkat nagari kepada masyarakat setempat. Dari pengamatan, peneliti melihat pelayanan yang baik kepada masyarakat, mereka tampak sudah saling mengenal.

## **6.5 Unit Analisis**

Untuk penelitian kualitatif unit analisis data sangat dibutuhkan dengan tujuan memfokuskan pembahasan dalam penelitian atau untuk menentukan kriteria objek yang diteliti. Unit analisis menentukan siapa, apa, dan tentang apa proses pengumpulan data difokuskan.



Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintah Nagari sebagai aktor penggerak pembangunan nagari termasuk dalam pengelolaan BUMNag sebagai wujud pembangunan nagari di Simpang Sugiran.

## **6.6 Analisis Data**

Analisis data didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagaian-bagian dan saling keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dan data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi (Afriзал 2014:175-176). Untuk menganalisis data, peneliti memilah data

penting, menginterpretasikan, mengkategorikan ke dalam kelompok-kelompok tertentu, dan mencari hubungan diantara kelompok-kelompok tersebut.

Pengumpulan data dan menganalisis data dilakukan bersamaan, itu artinya selama proses penelitian, peneliti juga langsung menganalisis datanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Taylor (1984:128), peneliti mulai membaca catatan lapangan, menangkap tema-tema penting yang muncul dari hasil wawancara ataupun observasi, dan mengembangkan konsep atau kategori-kategori. Kemudian beberapa saat setelah peneliti memulai penelitian, peneliti berusaha lebih memfokuskan penelitiannya termasuk analisis data.

Data yang didapat di lapangan akan dicatat pada catatan lapangan. Setelah semua data terkumpul maka yang langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah menganalisis seluruh data baik itu data primer ataupun data sekunder yang didapat peneliti mulai dari awal penelitian sampai diakhir penelitian. Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti melakukan teknik triangulasi (cek dan rhecek), yaitu memeriksa kembali kebenaran informasi yang didapat dari informan penelitian.

## **6.7 Defenisi Konsep**

### **1. Nagari**

Nagari diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara'- Syara' Basandi Kitabullah* dan/ atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat

setempat dalam wilayah provinsi Sumatera Barat. Nagari yang dikaji dalam penelitian ini adalah Nagari Simpang Sugiran.

## **2. Pemerintah Nagari**

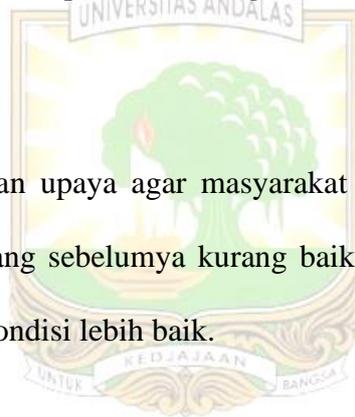
Pemerintah Nagari adalah Kapalo Nagari atau nama lainnya dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari. Adapun yang dimaksud pemerintah nagari dalam penelitian ini adalah pemerintah nagari Simpang Sugiran.

## **3. Peran**

Peran merupakan aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan seorang. Maka dalam penelitian ini dilihat peran pemerintah nagari Simpang Sugiran.

## **4. Pembangunan**

Pembangunan merupakan upaya agar masyarakat mengikuti proses agar dapat mencapai kehidupan dari yang sebelumnya kurang baik bahkan dianggap tidak baik, hingga akhirnya mencapai kondisi lebih baik.



## **5. BUMNag**

Badan Usaha Milik Nagari yang disingkat BUMNag diartikan sebagai lembaga usaha nagari yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah nagari yang berorientasi untuk memperkuat perekonomian nagari yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi sumber daya.

## **6.8 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan Nagari Simpang Sugiran merupakan nagari yang pengelolaan BUMNagnya berhasil di

Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebagaimana yang tercantum pada latar belakang, BUMNag Zigiran Mandiri memperoleh peringkat pertama dalam penilaian BUMNag terbaik ditingkat kabupaten Lima Puluh Kota, dan juga meraih peringkat keempat sebagai BUMNag terbaik ditingkat Provinsi Sumatera Barat. Maka dari itu, BUMNag Zigiran Mandiri di Nagari Simpang Sugiran menarik diteliti, Nagari yang letaknya jauh dari keramaian namun tidak menghalangi nagari untuk maju.

### 6.9 Rancangan Jadwal Penelitian

Rancangan jadwal penelitian disusun untuk dijadikan sebagai pedoman peneliti, agar penelitian dapat berlangsung dengan baik dan tepat waktu. Penelitian dimulai dari bulan November sampai Februari 2021. Untuk lebih jelasnya peneliti membuat rincian tahap pelaksanaan penelitian pada tabel berikut:

**Tabel 1.3**  
**Jawal Penelitian**

No.	Nama Kegiatan	2020		2021		
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1.	Seminar Proposal					
2.	Penyusunan Pedoman Wawanacara					
3.	Turun Lapangan					
4.	Analisis Data					
5.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi					
6.	Ujian Skripsi					